



► DUGAAN GRATIFIKASI SATPOL PP

23 Korban PHK Mengadu

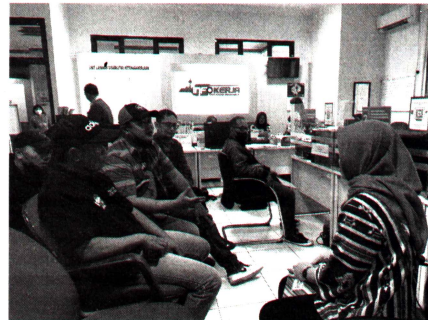
UMBULHARJO—Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Kota Jogja menerima aduan 23 korban pemutusan hubungan kerja (PHK) tenaga pengamanan di Kantor Satpol PP Jogja, Kamis (25/5). Laporan aduan disampaikan 10 orang perwakilan korban.

*Triyo Handoko
 triyo@harianjogja.com*

Kepala Dinsosnakertrans Kota Jogja, Maryustion Tonang mengaku baru melakukan konsultasi terhadap aduan dari para korban PHK. "Kami berikan konsultasi untuk membuat laporan aduannya, tadi disebutkan laporan akan segera dikirim paling lambat besok pagi [hari ini]. Kami siap memfasilitasi," katanya. Fasilitasi yang akan diberikan Dinsosnakertrans, kata Maryustio, dengan mengadakan audiensi antara pihak pemberi kerja dan pekerja. "Tetapi perlu kami pelajari dulu aduannya seperti apa," ujarnya. Terkait dengan adanya dugaan andil Satpol PP Kota Jogja, ada kemungkinan Dinsosnakertrans akan

- Fasilitasi yang akan diberikan Dinsosnakertrans yakni dengan mengadakan audiensi antara pihak pemberi kerja dan pekerja.
- Ganjilnya, undangan penyampaian PHK hanya berupa pesan melalui Whatsapp.

menghadirkannya dalam mediasi. "Mediasi ini untuk mencari jalan terbaik, jika mungkin dihadirkan tentu akan dihadirkan, tetapi kami perlu mempelajari dulu aduannya sebelum mediasi," katanya. Salah satu korban PHK, Hermawan menyebut ada sekitar 150 tenaga pengamanan di Satpol PP Jogja yang berstatus pekerja kontrak. "Kami juga bingung kenapa hanya kami yang diberhentikan tanpa alasan yang jelas," ujarnya. **Lewat Whatsapp** Total tenaga pengamanan yang diberhentikan sebanyak 23 orang. "Saat ini semuanya menganggur. Pada Maret kami dijanjikan akan dipekerjakan lagi setelah dua bulan, tetapi nyatanya sampai sekarang janji tidak teralisasi," katanya. Ganjilnya, undangan penyampaian PHK hanya berupa pesan melalui Whatsapp. "Pesannya



Harian Jogja/Triyo Handoko

Suasana konsultasi korban PHK tenaga pengamanan Satpol PP Kota Jogja ke Dinsosnakertrans, Kamis (25/5).

1 Maret pertemuan untuk memberhentikan 2 Maret, aneinya lagi pertemuan untuk PHK tidak dilakukan di kantor perusahaan *outsourcing* yang memberikan kontrak kerja kepada kami, tetapi di rumah salah satu pegawai perusahaan," katanya. Hermawan menyebut dari berbagai keganjilan tersebut muncul dugaan adanya gratifikasi penerimaan tenaga pengamanan di Satpol PP. "Kecurigaan kami menguat setelah tahu ternyata posisi kami sudah digantikan orang lain, padahal sebelumnya kami dijanjikan akan dipekerjakan lagi. Akhirnya kami melaporkan kasus ini," katanya. Hermawan bersama 22 orang lain sudah

melaporkan masalah ini ke Dinsosnakertrans Kota Jogja pada Kamis. "Ada berkas yang perlu kami siapkan, paling lambat besok pagi kami lengkapi," katanya. Para korban PHK, menurut Hermawan, berharap agar dapat bekerja lagi. "Kami berharap dapat dipekerjakan lagi, karena sudah lama mengabdikan, dan sesuai kontrak kerja kami masih dikontrak hingga Desember 2023," katanya. Untuk dugaan gratifikasi saat ini masih diselidiki Inspektorat Kota Jogja. Hasil sementara penyelidikan tersebut menunjukkan adanya indikasi gratifikasi dalam penerimaan pekerja kontrak tenaga pengamanan di Satpol PP Kota Jogja.

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Sat Pol PP			

Yogyakarta, 31 Desember 2024
 Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
 NIP. 19690723 199603 1 005